

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan pada pemerintahan sangat dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan pada sumber daya pemerintahan yang ada. Pihak – pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah investor, karyawan, debitur, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat (Putra & Gunadi, 2017). Pelaporan keuangan harus dapat menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, menyajikan informasi mengenai prestasi pemerintahan dalam satu periode, dan menyediakan informasi yang dapat diketahui oleh pengguna.

Pada keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Prasetya et al., 2017).

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan

pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan pemerintah desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki berbagai sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, lalu perlu melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya (Lisda et al., 2018).

Kualitas laporan keuangan sebagaimana digambarkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (PP No.71 tahun 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nadir & Hasyim, 2017).

Fenomena yang terjadi, suatu laporan keuangan meski mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi (Putera, 2018). Laporan keuangan harus digunakan sebagai alat untuk *feed back* membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik.

Fenomena lain yang terjadi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP kepada 30 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, atas laporan keuangan masing-masing pemda untuk tahun anggaran 2019

(Mustholih, 2020). Kota Pati menjadi salah satu kota/kabupaten yang ada dalam daftar tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati mendapat opini WTP dari BPK RI. Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah suatu daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pada tahun 2017, 2018, serta 2019 Kabupaten Pati Kembali mendapat opini WTP (Naufal, 2019).

Namun yang terjadi di Organisasi Pemerintahan Desa, Kades Dukutalit, Juwana, diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2019 dan 2020. Dana Desa yang dicurigai telah diselewengkan diantaranya, proyek pembangunan rabat beton yang dikerjakan oleh pihak rekanan, dalam hal ini yang melakukan pelaksanaan pekerjaan yakni Bumdesma. Proyek pembangunan tersebut seharusnya dikerjakan secara swakelola, karena bersumber dari Dana Desa tahun 2019 senilai Rp 136 juta. Sampai saat ini pihak Bumdesma belum dibayar oleh Kepala Desa hingga pihak Bumdesma melakukan penagihan kepada Kepala Desa Dukutalit senilai Rp. 73.000.000. Tak hanya itu, pajak Dana Desa tahun 2020 juga belum dibayar dengan total kurang lebih Rp 50 juta (PJ, 2020).

Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan

keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat berkualitas (Ramadhani, 2018).

Variabel yang pertama adalah kompetensi SDM. Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompeten (Hardyansyah, 2016). Menurut Febriady (2013) dan (Gumelar, 2017), Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, diharuskan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Prasetya et al. (2017) Mengatakan bahwa mengelola keuangan desa itu tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya, tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Penelitian Ramadhani (2018) dan Atikah (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, menurut penelitian Nadir & Hasyim (2017) dan Pujanira (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki belum cukup memadai untuk memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga dilihat dari hasil penelitian rata-rata aparatur pemerintahan memberikan jawaban yang cukup rendah.

Variabel yang kedua adalah etika kepemimpinan. Menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas, etika kepemimpinan sangat diperlukan. Etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Septiwanti, 2018). Seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik akan mampu membawa

organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin (Putra & Gunadi, 2017). Penelitian Yanti (2019) dan Basudewa & Putri (2019) mengindikasikan bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun menurut penelitian Sinaranata et al. (2019) dan Suari (2019) Etika kepemimpinan berpengaruh negatif dalam kualitas laporan keuangan karena baik atau tidaknya sikap para pemimpin tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sehingga dalam pelaporan keuangan penilaian kualitas itu tidak ada kaitannya dengan etika seorang pemimpin karena pelaporan keuangan sudah sesuai dengan standar pelaporan yang ada dan kinerja dari sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

Variabel yang ketiga adalah sistem pengendalian internal. Dalam PP No 8 Tahun 2006, Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur [sumber daya](#) suatu organisasi. Penelitian Riandani (2017) dan Lisda et al. (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun menurut penelitian Ramadhani (2018) dan Njonjie et al. (2019) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan belum

diterapkannya indikator sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Variabel yang ke empat adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan keadaan atau pandemi sekarang ini dapat memanfaatkan fasilitas teknologi, semua Organisasi Pemerintahan Desa dan unit kerja bersedia dilakukan pemeriksaan terinci mengenai laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah (Nadir & Hasyim, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah (Basudewa & Putri, 2019). Penelitian Nadir & Hasyim (2017) dan Basudewa & Putri (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun menurut Riandani (2017) dan Ramadhani (2018) teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan, hal ini dikarenakan tingkat kecanggihan dan pemanfaatan teknologi informasi akan tidak berpengaruh jika nilai pemanfaatan dan kecanggihan teknologi informasi yang digunakan juga rendah.

Dengan adanya *research gap* dan fenomena diatas, maka Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi dapat bersama sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya suatu laporan keuangan meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi (Putera, 2018). Dengan demikian pelaporan keuangan harus dapat menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, menyajikan informasi mengenai prestasi pemerintahan dalam satu periode, dan menyediakan informasi yang dapat diketahui oleh pengguna, maka dengan ini peneliti merumuskan permasalahan, antara lain:

- 1.2.1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 1.2.2. Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 1.2.3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 1.2.4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 1.2.5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah,

- 1.3.1. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 1.3.2. Membuktikan secara empiris pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 1.3.3. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
- 1.3.4. Membuktikan secara empiris pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
- 1.3.5. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah,

1.4.1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi *Stewardship Theory* dengan hubungan antar variabel kompetensi sumber daya manusia, etika kepemimpinan, pengendalian internal, serta teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Desa di kecamatan Juwana, kabupaten pati.

1.4.2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan,

1. Organisasi Pemerintah Desa di Kecamatan Juwana, sebagai sumber informasi dan masukan pemerintahan desa dalam pembuatan serta pengelolaan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
2. Regulator, sebagai usaha dalam meningkatkan nilai informasi dalam laporan keuangan daerah, khususnya pemerintahan desa yang berkualitas.
3. Masyarakat/ *Stakeholder*, sebagai nilai informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.5. Sistematika penelitian

Sistematika penelitian ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II (Tinjauan Pustaka) : Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis

BAB III (Metode Penelitian) : Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV (Hasil dan Pembahasan) : Menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab terakhir dari penelitian ini yang menguraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh dalam pembahasan. Serta terdapat saran saran dan batasan yang diperoleh dari penelitian.